

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PRABUMULIH MENURUT PENGELUARAN

2018 - 2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PRABUMULIH MENURUT PENGELUARAN

2018 - 2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PRABUMULIH MENURUT PENGELUARAN, 2018-2022

ISSN : 2723-8237
No. Publikasi : 16720.2305
Katalog BPS : 9302020.1672
Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 72 halaman

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

Tim Penyusun Naskah

- Penanggung jawab Umum : Basuki Rahmat, S.ST, M.Stat
- Penanggung jawab Teknis : Nukke Anastasya, SST
- Penulis : Nukke Anastasya, SST
- Editor : Desi Imelda, SE
- Tata Letak : Elsy Gumayanti Elfahma, S.ST
- Gambar Kulit : Yogi Kurniawan, A.Md.

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

Dicetak Oleh : -

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* (SNA 2008) seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Prabumulih, 14 April 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Prabumulih

Basuki Rahmat, S.ST, M.Stat

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	xi
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB.....	5
Bab II Metode Estimasi Dan Sumber Data	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5 Perubahan Inventori	22
2.6 Ekspor Dan Impor Barang Serta Jasa	26
Bab III Tinjauan Perekonomian Kota Prabumulih Berdasarkan PDRB Pengeluaran Kota Prabumulih, 2018– 2022	31
3.1 Gambaran Umum Perekonomian	31
3.2 Tinjauan Agregat PDRB Pengeluaran Kota Prabumulih.....	32
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	37
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	41
3.5 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	42
3.6 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	44
3.7 Perkembangan Perubahan Inventori.....	46
3.8 Perkembangan Ekspor Barang Dan Jasa	47
3.9 Perkembangan Impor Barang Dan Jasa	47
3.10 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah.....	49
Bab IV Perkembangan Agregat PDRB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022	53
4.1 PDRB (Nominal).....	53

4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor.....	54
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB.....	55
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	56
4.5	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB.....	57
4.6	Perbandingan Impor Terhadap PDRB.....	58
4.7	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	59
Bab V	Penutup	63
Lampiran	65

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1. PDRB Atas dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	32
Tabel 3. 2. PDRB Atas dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	33
Tabel 3. 3. Distribusi PDRB ADHB Atas Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	35
Tabel 3. 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	36
Tabel 3. 5. Indeks Implisit PDRB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	37
Tabel 3. 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Prabumulih, 2018 – 2022.....	38
Tabel 3. 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Prabumulih, 2018 – 2022	39
Tabel 3. 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Prabumulih, 2018 – 2022.....	40
Tabel 3. 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Prabumulih, 2018 – 2022	41
Tabel 3. 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Prabumulih,2018 – 2022	42
Tabel 3. 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Prabumulih, 2018 – 2022.....	43
Tabel 3. 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Prabumulih, 2018 – 2022	45
Tabel 3. 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Prabumulih, 2018 – 2022	46
Tabel 3. 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Prabumulih,2018 – 2022	47
Tabel 3. 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kota Prabumulih, 2018 – 2022	48
Tabel 3. 16. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kota Prabumulih, 2018-2022	50

Tabel 4. 1.	PDRB dan PDRB Perkapita Kota Prabumulih, Tahun 2018 – 2022.....	54
Tabel 4. 2.	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2018 – 2022	55
Tabel 4. 3.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2018 – 2022.....	56
Tabel 4. 4.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Prabumulih, Tahun 2018 – 2022	57
Tabel 4. 5.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kota Prabumulih, Tahun 2018 – 2022.....	58
Tabel 4. 6.	Rasio Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2022	58
Tabel 4. 7.	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kota Prabumulih, Tahun 2018 – 2022	60

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kota Prabumulih, 2018 – 2022.....	34
-----------	--	----

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	67
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	68
Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	69
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	70
Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022	71
Lampiran 6. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

<https://pramulihkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. **Menurut Pendekatan Produksi,**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto,
5. Perubahan inventori
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan

dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.



BAB II
METODE ESTIMASI
DAN SUMBER DATA

<http://braburaburakota.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan

7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil

penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas Sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi,

bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil updating direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT Atas Dasar Harga Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan

barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov./Kab./Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK 2010, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

- *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit).
- *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data

dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (entertainment, literary, or artistic original products), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi,

barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan,

perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;

- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari

Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara men"*deflate*" stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan meng"*inflate*" perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak

tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. *men-deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KOTA PRABUMULIH
BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN KOTA
PRABUMULIH, 2018 – 2022

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA PRABUMULIH BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 – 2022

3.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN

Tingkat aktivitas perekonomian dunia internasional akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2007), tingkat aktivitas ekonomi tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekspor hasil industri dipengaruhi oleh pertumbuhan perdagangan dunia, yang erat kaitannya dengan pasar negara maju dan adanya proteksi negara lain.
2. Keberadaan modal untuk investasi, baik berupa investasi langsung maupun pinjaman, dipengaruhi pula oleh faktor internasional.
3. Kemajuan teknologi negara-negara maju menjadi penghambat daya saing negara-negara berkembang.
4. Manajemen organisasi, misalnya gaya Jepang 'just in time' dalam pengadaan suku cadang yang didukung oleh pengendalian stok dengan komputer.

Perubahan struktur ekonomi Kota Prabumulih akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2018 s.d 2022, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Prabumulih digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.2 TINJAUAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA PRABUMULIH

Sejak awal tahun 2020, pandemi Covid-19 telah melanda seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan sekolah dan bekerja dari rumah (*work from home*), penerapan *lockdown* untuk mencegah masyarakat memasuki atau meninggalkan area tertentu, pembatasan kegiatan transaksi ekonomi di pasar, pusat perbelanjaan, serta pembatasan akses transportasi dengan menutup bandara, adalah sebagian dari strategi pemerintah yang ditujukan untuk menekan kasus Covid-19 tetapi disisi lain membuat perekonomian Indonesia terguncang, termasuk di Kota Prabumulih.

Tabel 3. 1. PDRB Atas dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018-2022

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4 723,09	5 070,12	5 137,77	5 314,88	5 924,56
2. Konsumsi LNPRT	118,76	130,27	125,64	132,16	144,41
3. Konsumsi Pemerintah	967,5	1 085,95	969,71	1 001,14	1 062,49
4. PMTB	3 024,04	3 155,67	3 177,43	3 125,82	3 466,28
5. Perubahan Inventori	-244,05	-106,57	3,62	-0,46	34,57
6. Net Ekspor Barang & Jasa	-1 420,22	-1 544,37	-1 546,85	-1 226,63	-1 423,81
Total PDRB	7 169,13	7 791,06	7 867,32	8 346,93	9 208,50

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Berdasarkan tabel 3.1, nilai PDRB Kota Prabumulih ADHB selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau ADH berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran

tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Tabel 3. 2. PDRB Atas dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018-2022

(Miliar Rupiah)

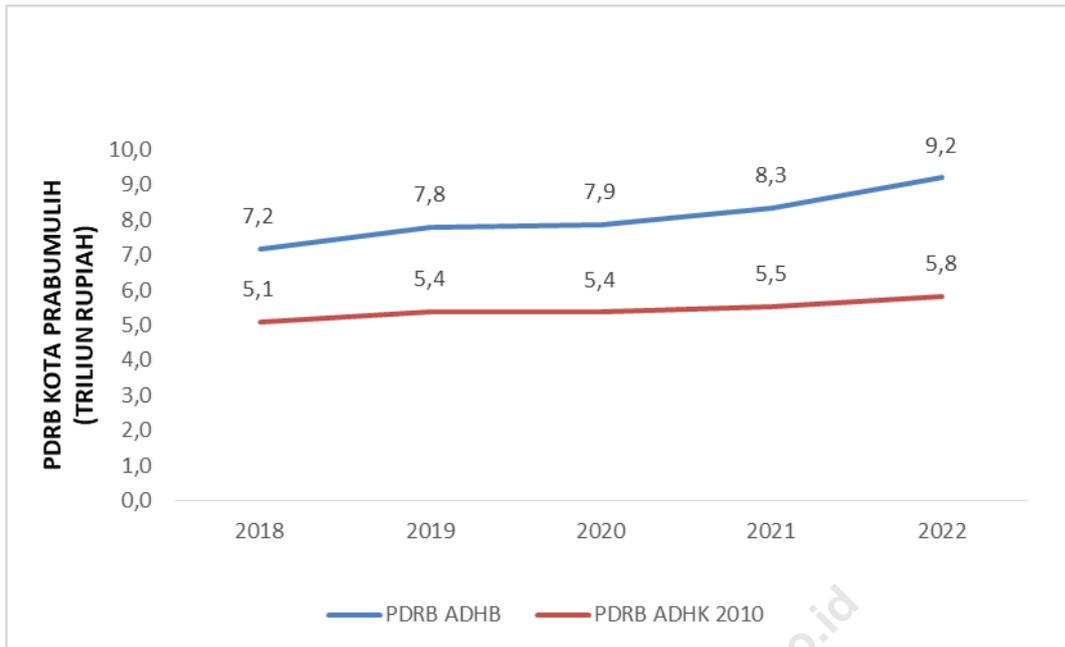
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 151,29	3 280,86	3 268,49	3 324,04	3 503,46
2. Konsumsi LNPRT	78,42	84,02	81,46	83,73	88,13
3. Konsumsi Pemerintah	643,55	693,04	618,20	619,37	649,88
4. PMTB	1 979,75	1 999,07	1 983,99	1 931,77	1 907,33
5. Perubahan Inventori	-199,51	-84,77	2,63	-0,29	23,90
6. Net Ekspor Barang & Jasa	-551,72	-584,41	-576,84	-416,65	-350,34
Total PDRB	5 101,77	5 387,82	5 377,93	5 541,97	5 822,37

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Selama kurun waktu 2018–2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Prabumulih berdasarkan PDRB ADHK 2010 dapat dilihat pada tabel 3.2. Kondisi perekonomian Kota Prabumulih menunjukkan peningkatan dari 2017-2019, tetapi terjadi penurunan (konstraksi) di tahun 2020 karena adanya wabah virus Covid-19. Pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasi Pandemi tersebut telah menyebabkan perekonomian di Kota Prabumulih di tahun 2020 mengalami guncangan sehingga terjadi penurunan produksi barang dan jasa secara ADHK 2010. Mulai tahun 2021 keadaan ekonomi berangsur mengalami pemulihan. Pemulihan ekonomi ini terjadi karena pada tahun 2021 kegiatan perekonomian sudah mulai aktif kembali walaupun diatur dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada Tahun 2022 perekonomian semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Grafik 1. Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 – 2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Dari grafik 1, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga yang selalu naik (inflasi) dalam perhitungan PDRB ADHB. Sedangkan pada PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga tersebut telah diabaikan. Inflasi yang dihitung pada PDRB merupakan inflasi pada level produsen. Inflasi pada level produsen menunjukkan kenaikan harga-harga produksi secara keseluruhan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan pada level produsen. Inflasi yang terjadi setiap tahun menyebabkan perbedaan antara PDRB ADHB dan ADHK terus melebar dari tahun ke tahun.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. 3. Distribusi PDRB ADHB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran,
2018—2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,88	65,08	65,31	63,67	64,34
2. Konsumsi LNPRT	1,66	1,67	1,60	1,58	1,57
3. Konsumsi Pemerintah	13,50	13,94	12,33	11,99	11,54
4. PMTB	42,18	40,50	40,39	37,45	37,64
5. Perubahan Inventori	-3,40	-1,37	0,05	-0,01	0,38
6. Net Ekspor Barang & Jasa	-19,81	-19,82	-19,66	-14,70	-15,46
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Berdasarkan Tabel 3.3, terlihat bahwa selama periode 2018 – 2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (sekitar 63-65 persen). Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 37 - 42 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah sendiri berada pada rentang 11 - 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar walaupun kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2018 – 2022 perdagangan dari dan ke luar kabupaten yang direpresentasikan oleh net ekspor barang dan jasa, menunjukkan bahwa nilai ekspor jauh lebih sedikit dari nilai impor. Hal ini dapat dilihat dari nilai net ekspor barang dan jasa yang memiliki nilai negatif antara 14 sampai dengan 19 persen. Selain itu, menunjukkan bahwa untuk memenuhi Konsumsi Rumah Tangga, LNPRT dan Pemerintah serta PMTB, Kota Prabumulih cenderung dipenuhi dari produk impor dibandingkan produk dari Kota Prabumulih sendiri. Kecenderungan tersebut menunjukkan perdagangan dari dan ke luar kabupaten dalam periode tersebut menunjukkan posisi minus.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil

PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih dari tahun 2018 - 2022 mengalami fluktuasi seperti yang tertera di tabel 3.4. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 5,83 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020, membuat perekonomian Kota Prabumulih mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi minus) sebesar -0,18 persen pada Tahun 2020. Sedangkan mulai tahun 2021 perekonomian mulai membaik hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,05 persen pada tahun 2021 dan 5,06 persen pada tahun 2022.

Tabel 3. 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018—2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,27	4,11	-0,38	1,70	5,40
2. Konsumsi LNPRT	7,66	7,15	-3,04	2,78	5,26
3. Konsumsi Pemerintah	7,07	7,69	-10,80	0,19	4,93
4. PMTB	3,54	0,98	-0,75	-2,63	-1,27
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang & Jasa	-	-	-	-	-
Total PDRB	5,83	5,61	-0,18	3,05	5,06

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan peningkatan seperti ditunjukkan dalam tabel 3.5.

Tabel 3. 5. Indeks Implisit PDRB Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018 - 2022

(persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	149,88	154,54	157,19	159,89	169,11
2. Konsumsi LNPRT	151,45	155,05	154,23	157,84	163,85
3. Konsumsi Pemerintah	150,34	156,69	156,86	161,64	163,49
4. PMTB	152,75	157,86	160,15	161,81	181,73
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang & Jasa	-	-	-	-	-
Total PDRB	140,52	144,61	146,29	150,61	158,16

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2018-2022 di Kota Prabumulih menempati porsi terbesar terhadap nilai PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Berdasarkan tabel 3.6, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2018-2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK 2010), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018-2022 cukup stabil antara 63 persen hingga 65 persen. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 65,88 persen dan terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu 65,08 persen.

**Tabel 3. 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Prabumulih,
2018—2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	4 723,09	5 070,12	5 137,77	5 314,88	5 924,56
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rupiah</i>)	3 151,29	3 280,86	3 268,50	3 324,04	3 503,46
c. Proporsi terhadap PDRB (<i>persen</i>)	65,88	65,08	65,31	63,67	64,34
d. Pertumbuhan ADHK 2010 Total Konsumsi Rumah Tangga (<i>persen</i>)	5,27	4,11	-0,38	1,70	5,40
Jumlah Penduduk					
a. Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)	184 425	188 669	192 426	195 748	199 047
b. Pertumbuhan Penduduk (<i>persen</i>)	1,26	2,30	1,99	1,73	1,69
PDRB Konsumsi Rumah Tangga per-kapita/tahun					
a. ADHB 2010 (<i>Juta Rupiah</i>)	25,61	26,87	26,70	27,15	29,76
b. ADHK 2010	17,09	17,39	16,99	16,98	17,60
c. Pertumbuhan ADHK 2010 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (<i>persen</i>)	3,96	1,77	-2,32	-0,03	3,65

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dengan kisaran -0,03 sampai dengan 3,96 persen. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga. Namun pada tahun 2020 dan 2021 konsumsi akhir rumah tangga mengalami penurunan sebesar 2,32 persen pada tahun 2020 dan 0,03 persen pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemic Covid-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat dari berbagai aspek. Akibat pandemi ini, banyak karyawan yang dirumahkan,

kehilangan sumber penghasilan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahun 2022 keadaan perekonomian sudah mulai pulih sehingga konsumsi akhir rumah tangga kembali mengalami peningkatan sebesar 3,65 persen.

**Tabel 3. 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Prabumulih,
2018—2022**

<i>(persen)</i>					
Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	52,26	52,35	52,66	52,05	51,87
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,75	3,76	3,55	3,52	3,56
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,88	14,79	14,93	15,38	15,77
d. Kesehatan & Pendidikan	8,30	8,22	8,54	8,75	8,63
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	12,62	12,58	12,25	12,17	12,11
f. Hotel dan Restoran	5,19	5,31	4,95	5,06	5,17
g. Lainnya	3,01	2,99	3,11	3,08	2,89
Total Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, kontribusi konsumsi makanan, minuman dan rokok terhadap total konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non-makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan, minuman dan rokok selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif dan berada pada kisaran 51 sampai dengan 52 persen terhadap total konsumsi rumah tangga.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19. Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara

kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat.

**Tabel 3. 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Prabumulih, 2018—2022**

(persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,01	4,03	-0,17	0,69	5,20
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,12	5,92	-5,66	0,11	7,64
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,94	3,05	1,15	2,57	5,84
d. Kesehatan & Pendidikan	5,55	3,83	3,74	4,67	4,56
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	6,19	4,99	-2,17	2,32	5,68
f. Hotel dan Restoran	5,58	5,50	-5,82	5,61	7,86
g. Lainnya	5,11	2,74	1,25	0,32	1,37

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan mengalami fluktuasi antara 2018-2022. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Pandemi Covid-19 membuat orang beralih menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Hal ini tercermin dari sub kelompok konsumsi kesehatan dan pendidikan yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,67 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,56 persen. Penurunan ini terjadi karena pandemi covid mulai berakhir dan dicabutnya aturan PPKM dari pemerintah mulai tahun 2022.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9, menunjukkan secara umum selama tahun 2018-2022 terjadinya peningkatan harga untuk setiap kelompok konsumsi. Berdasarkan tabel tersebut, dalam kurun waktu 2018-2022 nilainya selalu positif atau dapat dikatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi inflasi pada

masing-masing sub komponen pada Konsumsi Rumah Tangga.

**Tabel 3. 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah
Tangga Kota Prabumulih, 2018—2022**

(persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,66	3,37	2,12	1,54	5,60
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,82	1,79	1,50	2,26	4,80
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,57	3,49	1,17	3,84	8,01
d. Kesehatan & Pendidikan	4,26	2,39	1,54	1,21	5,25
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5,60	1,96	0,83	0,49	4,90
f. Hotel dan Restoran	9,87	4,14	0,39	0,05	5,57
g. Lainnya	3,50	3,94	3,89	2,14	3,15

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian, tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Prabumulih. Tabel 3.10 berikut ini menunjukkan proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB.

Berdasarkan tabel 3.10, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi LNPRT pada periode 2018-2022 mengalami perubahan nilai yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi nilai terhadap PDRB yang berada pada kisaran antara 1,57 sampai dengan 1,67 persen.

Tabel 3. 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Prabumulih, 2018—2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	118,76	130,27	125,64	132,16	144,41
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rupiah</i>)	78,42	84,02	81,46	83,73	88,13
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,66	1,67	1,60	1,58	1,57
Pertumbuhan (<i>persen</i>)	7,66	7,15	-3,04	2,78	5,26

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan dari tahun 2018-2022, baik untuk adh berlaku maupun adh konstan 2010. Namun LNPRT tidak luput dari efek pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,04 persen. Akibat Pandemi Covid-19, banyak kegiatan-kegiatan partai dan lembaga *nonprofit* lainnya ditunda. Bahkan sempat dikeluarkannya edaran pemerintah agar masyarakat melakukan ibadah di rumah masing-masing, termasuk kegiatan sholat Tarawih, sholat Jumat, dan sholat Idul Fitri. Pada tahun 2021 pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT mengalami peningkatan kembali menjadi 2,78 persen dan terus meningkat di tahun 2022 dengan angka pertumbuhan sebesar 5,26 persen. Hal ini terjadi karena aktivitas peribadahan, partai, dan perkumpulan berbagai klub sudah mulai aktif kembali.

3.5 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan seberapa besar pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Prabumulih serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 3. 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Prabumulih,
2018 – 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	967,50	1 085,95	969,71	1 001,14	1 062,49
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rupiah</i>)	643,55	693,04	618,2	619,37	649,88
c. Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	13,50	13,94	12,33	11,99	11,54
d. Pertumbuhan konsumsi pemerintah	7,07	7,69	-10,80	0,19	4,93
Konsumsi Pemerintah per-kapita					
a. ADHB (<i>Juta Rupiah</i>)	5,25	5,76	5,94	5,11	5,34
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rupiah</i>)	3,49	3,67	3,21	3,16	3,26
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	184 425	188 669	192 426	195 748	199 047

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB selama 2018-2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB mencapai 967,50 miliar rupiah, kemudian terus meningkat kecuali pada tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan menjadi 969,71 miliar. Pada tahun 2021 dan 2022 nilainya meningkat lagi menjadi 1 001,14 miliar pada tahun 2021 dan 1 062,49 miliar rupiah pada tahun 2022.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki nilai pertumbuhan yang fluktuatif. Bahkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 10,80 persen. Hal ini tak lepas dari adanya program efisiensi anggaran terhadap pengeluaran pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah lebih mengutamakan pembangunan jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara dan fasilitas transportasi lainnya sehingga lebih banyak PMTB yang dihasilkan.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang

diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHB secara total menunjukkan adanya peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah ADHB per-kapita.

Sedangkan rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADHB 2010 menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas seiring dengan pertumbuhan penduduk.

3.6 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun impor dari luar Kota Prabumulih.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRM maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.12 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 3,54 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yang mengalami kontraksi hingga 2,63 persen.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi setiap tahunnya. Pertumbuhan PMTB pada sub komponen bangunan maupun non bangunan sama-sama memiliki nilai yang fluktuatif. Pertumbuhan PMTB sub komponen bangunan mengalami trend menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bahkan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pertumbuhan mengalami kontraksi. Pada tahun 2022 pertumbuhan sudah kembali meningkat walaupun nilainya masih mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen.

Tabel 3. 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Prabumulih, 2018—2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	3 024,04	3 155,67	3 177,43	3 125,82	3 466,28
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rupiah</i>)	1 979,75	1 999,07	1 983,99	1 931,77	1 907,33
c. Proporsi terhadap PDRB (<i>persen</i>)	42,18	40,50	40,39	37,45	37,64
d. Pertumbuhan PMTB (<i>persen</i>)	3,54	0,98	-0,75	-2,63	-1,27
ADHB PMTB per Jenis					
1. a. PDRB PMTB Bangunan (<i>Miliar Rupiah</i>)	2 309,83	2 434,70	2 425,13	2 448,43	2 870,01
b. Proporsi PMTB Bangunan (<i>persen</i>)	32,22	31,25	30,83	29,33	31,17
2. a. PDRB PMTB Non Bangunan (<i>Miliar Rupiah</i>)	714,21	720,97	752,30	677,39	596,28
b. Proporsi PMTB Non Bangunan (<i>persen</i>)	9,96	9,25	9,56	8,12	6,48
ADHK 2010 PMTB per Jenis					
1. a. PDRB PMTB Bangunan (<i>Miliar Rupiah</i>)	1 406,44	1 459,84	1 431,11	1 438,78	1 495,59
b. Laju pertumbuhan PMTB Bangunan (<i>persen</i>)	5,30	3,80	-0,75	-2,63	-1,27
2. a. PDRB PMTB Non Bangunan (<i>Miliar Rupiah</i>)	573,31	539,23	552,88	492,99	411,74
b. Laju pertumbuhan PMTB Non Bangunan (<i>persen</i>)	-0,55	-5,94	2,53	-10,83	-16,48

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Pertumbuhan sub komponen non bangunan lebih berfluktuatif. Pertumbuhan pada tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar 0,55 persen. Kemudian pada tahun 2019 kontraksi semakin dalam menjadi sebesar 5,94 persen. Pada tahun 2020, meningkat mencapai pertumbuhan sebesar 2,53 persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh pengadaan pemerintah berupa alat-alat kesehatan, peralatan pendukung pelayanan kesehatan hingga peningkatan fasilitas kesehatan. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan tahun 2018 maupun 2019 yaitu sebesar persen 10,83 persen pada tahun 2021 dan 16,48 persen pada tahun 2022.

3.7 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi.

**Tabel 3. 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Prabumulih,
2018—2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	-244,05	-106,57	3,62	-0,46	34,57
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rupiah</i>)	-199,51	-84,77	2,63	-0,29	23,90
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-3,40	-1,37	0,05	-0,01	0,38

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB Kota Prabumulih selama tahun 2018-

2022 tidak lebih dari 0,5 persen. Selama Tahun 2020 dan 2022 nilai perubahan inventori di Kota Prabumulih bernilai positif yang berarti persediaan yang ada di Kota Prabumulih bertambah. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, dan 2021 nilainya negatif, yang artinya terjadi pengurangan barang persediaan pada tahun tersebut.

3.8 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh residen dari luar wilayah yang singgah dan sebagainya.

Tabel 3. 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Prabumulih, 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	2 465,95	2 047,33	2 119,34	2 294,07	2 521,08
b. ADHK (<i>Miliar Rupiah</i>)	1 977,76	1 708,29	1 678,41	1 736,91	1 891,95
c. Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	34,40	26,28	26,94	27,48	27,38

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Secara total, nilai ekspor tahun 2018-2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif baik menurut ADHB maupun ADHK tahun dasar 2020. Proporsi Ekspor barang dan jasa terhadap PDRB pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada antara 26 sampai dengan 34 persen.

3.9 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka

komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Prabumulih terhadap ekonomi atau produk daerah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Prabumulih di luar Kota Prabumulih, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 3. 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Prabumulih,
2018 – 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	3 886,17	3 591,70	3 666,19	3 520,69	3 944,90
b. ADHK (<i>Miliar Rupiah</i>)	2 529,48	2 292,69	2 255,24	2 153,56	2 242,28
c. Proporsi terhadap PDRB ADHB (persen)	54,21	46,10	46,60	42,18	42,84

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Tabel 3.15 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kota Prabumulih pada periode tahun 2018 - 2022 untuk nilai berdasarkan ADHB mengalami nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk nilai impor berdasarkan ADHK 2010 cenderung menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 nilai impor berdasarkan ADHK 2020 meningkat menjadi 2 242,28. Proporsi nilai impor terhadap PDRB dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada pada kisaran 42 sampai dengan 54 persen. Pada tahun 2018, proporsinya terhadap PDRB sebesar 54,21 persen

sedangkan tahun 2022 nilainya menjadi sebesar 42,84 persen. Penurunan tersebut menunjukkan berkurangnya ketergantungan penduduk Kota Prabumulih terhadap produk dari luar Kota Prabumulih.

3.10 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota atau provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB ADHK 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Pada suatu negara, net ekspor dikatakan juga sebagai neraca perdagangan. Neraca perdagangan positif suatu negara akan mempengaruhi cadangan devisa serta nilai mata

uang suatu negara. Sedangkan pada wilayah Kabupaten/Kota, hal tersebut tidak terjadi karena ekspor impor dari dan ke Kota Prabumulih dapat berasal dari Luar negeri maupun dari dalam negeri baik dalam dalam satu provinsi maupun dari luar provinsi.

Peningkatan atau penurunan net ekspor suatu kabupaten/kota pada PDRB menurut penggunaan hanya akan mempengaruhi ketergantungan suatu kabupaten/kota dalam memenuhi konsumsi baik yang digunakan oleh Rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah maupun dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Tabel 3. 14. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kota Prabumulih, 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor (Ekspor-Import)					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	-1 420,22	-1 544,37	-1 546,85	-1 226,63	-1 423,81
b. ADHK (Miliar Rupiah)	-551,72	-584,41	-576,84	-416,65	-350,34
c. Proporsi terhadap PDRB ADHB (persen)	-19,81	-19,82	-10,73	-7,52	-6,02

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

BAB IV
PERKEMBANGAN
AGREGAT PDRB KOTA
PRABUMULIH MENURUT
PENGELUARAN TAHUN
2018 – 2022

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA PRABUMULIH MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018 – 2022

4.1 PDRB (NOMINAL)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan agregat yang menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. PDRB per-kapita kota Prabumulih secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2020 (tabel 4.1), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Prabumulih rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan per-kapita secara “riil” berfluktuasi dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 4,5 persen sedangkan tahun 2022 mengalami perlambatan menjadi 3,3 persen. Bahkan pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

**Tabel 4. 1. PDRB dan PDRB Perkapita Kota Prabumulih,
2018—2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
- ADHB (<i>Miliar Rupiah</i>)	7 169,13	7 791,06	7 867,32	8 346,93	9 208,50
- ADHK 2010 (<i>Miliar Rupiah</i>)	5 101,77	5 387,82	5 377,93	5 541,97	5 822,37
Nilai PDRB per Kapita					
- ADHB (<i>Juta Rupiah</i>)	38,87	41,29	40,88	42,64	46,26
- ADHK 2010 (<i>Juta Rupiah</i>)	27,66	28,56	27,95	28,31	29,25
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	184 425	188 669	192 426	195 748	199 047
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 per kapita (<i>persen</i>)	4,5	3,2	-2,1	1,3	3,3
Pertumbuhan Penduduk (<i>persen</i>)	1,26	2,30	1,99	1,73	1,69

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Prabumulih (diatas 60 persen), yang artinya bahwa produk yang dihasilkan maupun dari Impor, sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4. 2. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2018—2022

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rupiah)	4 723,09	5 070,12	5 137,77	5 314,88	5 924,56
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rupiah)	2 465,95	2 047,33	2 119,34	2 294,07	2 521,08
Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor (kali)	1,92	2,48	2,42	2,32	2,35

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Nilai PDRB yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga mencapai 2,35 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,48 kali. Secara implisit data tersebut menjelaskan bahwa pada 2019, kenaikan nilai konsumsi akhir rumah tangga lebih besar dari kenaikan nilai ekspor barang/jasa.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga termasuk Kota Prabumulih.

Seperti halnya terhadap ekspor luar negeri, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB dari tahun 2018-2022 relatif stabil, berada pada kisaran 1,5-1,7 persen. Ini artinya

setiap 1,5-1,7 juta rupiah produk barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga, menghasilkan PMTB senilai 1 juta rupiah.

Tabel 4. 3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2018—2022

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rupiah)	4 723,09	5 070,12	5 137,77	5 314,88	5 924,56
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rupiah)	3 024,04	3 155,67	3 177,43	3 125,82	3 466,28
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,56	1,61	1,62	1,70	1,71

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga konsumen akhir tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Pada Tahun 2018-2022, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB 77 – 81 persen. Pada Tahun 2022 proporsi konsumsi akhir mencapai 77,44 persen yang artinya bahwa sebesar 77,44 persen dari total PDRB di Kota Prabumulih di gunakan sebagai konsumsi.

**Tabel 4. 4. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Prabumulih,
Tahun 2018—2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	4 723,09	5 070,12	5 137,77	5 314,88	5 924,56
b. LNPRT	118,76	130,27	125,64	132,16	144,41
c. Pemerintah	967,50	1 085,95	969,71	1 001,14	1 062,49
Total Konsumsi Akhir	5 809,36	6 286,33	6233,12	6 448,18	7 131,46
PDRB (ADHB) (Miliar Rupiah)	7 169,13	7 791,06	7 867,32	8 346,93	9 208,50
Proporsi Konsumsi Akhir terhadap Total PDRB (persen)	81,03	80,69	79,23	77,25	77,44

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan barang kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Pada tahun 2018-2022 ekspor mempunyai nilai yang lebih kecil dari PMTB. Pola rasio ekspor terhadap PMTB dari tahun 2018 sampai dengan 2022 berkisar antara 0,6 hingga 0,8. Ini artinya, selama Tahun 2018-2022, nilai ekspor jauh lebih sedikit daripada nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 4. 5. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Kota Prabumulih,
2018—2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rupiah)	2 465,95	2 047,33	2 119,34	2 294,07	2 521,08
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rupiah)	3 024,04	3 155,67	3 177,43	3 125,82	3 466,28
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,82	0,65	0,67	0,73	0,73

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

4.6 PERBANDINGAN IMPOR TERHADAP PDRB

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang berasal dari impor dengan produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB). Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin rendah, dan sebaliknya

Tabel 4. 6. Rasio Kota Prabumulih Tahun 2018—2022

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor (ADHB) (Miliar Rupiah)	3 886,17	3 591,70	3 666,19	3 520,69	3 944,9
Total PDRB (ADHB) (Miliar Rupiah)	7 169,13	7 791,06	7 867,32	8 346,93	9 208,5
Rasio Impor (ADHB) terhadap Total PDRB (ADHB)	0,54	0,46	0,47	0,42	0,43

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Rasio impor terhadap PDRB Kota Prabumulih tahun 2018 - 2022 menunjukkan pola

yang fluktuatif. Jika pada tahun 2018, rasio impor terhadap PDRB Kota Prabumulih mencapai 0,54, sementara pada tahun 2022 rasio impor terhadap PDRB mencapai 0,43. Hal ini bermakna bahwa sekitar 43 persen barang/jasa yang dikonsumsi oleh residen Kota Prabumulih berasal dari luar. Penurunan rasio ini menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

4.7 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) melalui investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter PDRB.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap penambahan output yang dihasilkan atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:

I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Besaran ICOR Kota Prabumulih tahun 2018-2019 berada dalam kisaran 6 hingga 7. Sedangkan pada tahun 2020 menyentuh level minus 200,53. Ini artinya penambahan kapital tidak diiringi dengan penambahan sejumlah output. Nilai ICOR Kota Prabumulih pada tahun 2022 mencapai 6,80 menunjukkan bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 juta rupiah

dibutuhkan PMTB sebesar 6,80 juta rupiah.

Tabel 4. 7. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Prabumulih, Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar rupiah)	5 101,77	5 387,82	5 377,93	5 541,97	5 822,37
Perubahan (Miliar rupiah)	280,93	286,05	-9,89	164,04	280,4
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rupiah)	1 979,75	1 999,07	1 983,99	1 931,77	1 907,33
ICOR	7,05	6,99	-200,53	11,78	6,80

Ket : *) :Angka Sementara

**):Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

BAB V

PENUTUP

<http://prabumulia.kota.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Prabumulih pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti jumlah penduduk), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018-2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana

<https://prabumulihkota.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://prabumulihkota.go.id>

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kota Prabumulih menurut
Pengeluaran, 2018-2022**

(miliar rupiah)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4 723,09	5 070,12	5 137,77	5 314,88	5 924,56
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2 468,32	2 654,18	2 705,72	2 766,36	3 073,32
b. Pakaian dan Alas Kaki	176,89	190,72	182,63	186,95	210,90
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	703,03	749,77	767,23	817,22	934,24
d. Kesehatan dan Pendidikan	391,85	416,57	438,78	464,80	511,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	595,84	637,88	629,23	647,01	717,25
f. Hotel dan Restoran	245,00	269,17	254,48	268,89	306,19
g. Lainnya	142,18	151,83	159,71	163,66	171,12
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	118,76	130,27	125,64	132,16	144,41
3. Konsumsi Pemerintah	967,50	1 085,95	969,71	1 001,14	1 062,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 024,04	3 155,67	3 177,43	3 125,82	3 466,28
a. Bangunan	2 309,83	2 434,70	2 425,13	2 448,43	2 870,01
b. Non-Bangunan	714,21	720,97	752,30	677,39	596,28
5. Perubahan Inventori	(244,05)	(106,57)	3,62	(0,46)	34,57
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(1 420,22)	(1 544,37)	(1 546,85)	(1 226,63)	(1 423,81)
PDRB	7 169,13	7 791,06	7 867,32	8 346,93	9 208,50

Ket : *) :Angka Sementara

 **) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kota Prabumulih menurut
Pengeluaran, 2018-2022**

(miliar rupiah)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 151,29	3 280,86	3 268,49	3 324,04	3 503,46
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1 685,95	1 753,88	1 750,85	1 762,99	1 854,70
b. Pakaian dan Alas Kaki	125,82	133,28	125,73	125,87	135,49
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	421,90	434,76	439,74	451,05	477,37
d. Kesehatan dan Pendidikan	270,67	281,04	291,54	305,16	319,09
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	401,85	421,91	412,75	422,34	446,34
f. Hotel dan Restoran	151,53	159,87	150,56	159,00	171,50
g. Lainnya	93,56	96,12	97,32	97,63	98,97
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	78,42	84,02	81,46	83,73	88,13
3. Konsumsi Pemerintah	643,55	693,04	618,20	619,37	649,88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 979,75	1 999,07	1 983,99	1 931,77	1 907,33
a. Bangunan	1 406,44	1 459,84	1 431,11	1 438,78	1 495,59
b. Non-Bangunan	573,31	539,23	552,88	492,99	411,74
5. Perubahan Inventori	(199,51)	(84,77)	2,63	(0,29)	23,90
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(551,72)	(584,41)	(576,84)	(416,65)	(350,34)
PDRB	5 101,77	5 387,82	5 377,93	5 541,97	5 822,37

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

**Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHB Kota Prabumulih menurut
Pengeluaran, 2018-2022**

(persen)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,88	65,08	65,31	63,67	64,34
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,43	34,07	34,39	33,14	33,37
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,47	2,45	2,32	2,24	2,29
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,81	9,62	9,75	9,79	10,15
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,47	5,35	5,58	5,57	5,56
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,31	8,19	8,00	7,75	7,79
f. Hotel dan Restoran	3,42	3,45	3,23	3,22	3,33
g. Lainnya	1,98	1,95	2,03	1,96	1,86
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,66	1,67	1,60	1,58	1,57
3. Konsumsi Pemerintah	13,50	13,94	12,33	11,99	11,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	42,18	40,50	40,39	37,45	37,64
a. Bangunan	32,22	31,25	30,83	29,33	31,17
b. Non-Bangunan	9,96	9,25	9,56	8,12	6,48
5. Perubahan Inventori	(3,40)	(1,37)	0,05	(0,01)	0,38
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(19,81)	(19,82)	(19,66)	(14,70)	(15,46)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK Kota Prabumulih
menurut Pengeluaran, 2018-2022**

(persen)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,27	4,11	-0,38	1,70	5,40
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,01	4,03	-0,17	0,69	5,20
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,12	5,92	-5,66	0,11	7,64
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,94	3,05	1,15	2,57	5,84
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,55	3,83	3,74	4,67	4,56
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,19	4,99	-2,17	2,32	5,68
f. Hotel dan Restoran	5,58	5,50	-5,82	5,61	7,86
g. Lainnya	5,11	2,74	1,25	0,32	1,37
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	7,66	7,15	-3,04	2,78	5,26
3. Konsumsi Pemerintah	7,07	7,69	-10,80	0,19	4,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,54	0,98	-0,75	-2,63	-1,27
a. Bangunan	5,30	3,80	-1,97	0,54	3,95
b. Non-Bangunan	-0,55	-5,94	2,53	-10,83	-16,48
PDRB	5,83	5,61	5,61	-0,18	3,05

Ket : *) :Angka Sementara

 **) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus,survei, dan sumber lain

Lampiran 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018-2022

(persen)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	149,88	154,54	154,54	157,19	159,89
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	146,41	151,33	151,33	154,54	156,91
b. Pakaian dan Alas Kaki	140,58	143,10	143,10	145,25	148,52
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	166,64	172,46	172,46	174,47	181,18
d. Kesehatan dan Pendidikan	144,77	148,22	148,22	150,50	152,31
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	148,27	151,19	151,19	152,45	153,20
f. Hotel dan Restoran	161,68	168,37	168,37	169,03	169,11
g. Lainnya	151,98	157,96	157,96	164,11	167,62
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	151,45	155,05	155,05	154,23	157,84
3. Konsumsi Pemerintah	150,34	156,69	156,69	156,86	161,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	152,75	157,86	157,86	160,15	161,81
a. Bangunan	164,23	166,78	166,78	169,46	170,17
b. Non-Bangunan	124,58	133,70	133,70	136,07	137,40
PDRB	140,52	144,61	144,61	146,29	150,61

Ket : *) :Angka Sementara

 **) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Lampiran 6. Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Prabumulih menurut Pengeluaran, 2018-2022

(persen)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,96	3,11	1,72	1,72	5,76
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,66	3,37	2,12	1,54	5,60
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,82	1,79	1,50	2,26	4,80
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,57	3,49	1,17	3,84	8,01
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,26	2,39	1,54	1,21	5,25
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,60	1,96	0,83	0,49	4,90
f. Hotel dan Restoran	9,87	4,14	0,39	0,05	5,57
g. Lainnya	3,50	3,94	3,89	2,14	3,15
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	5,39	2,37	-0,53	2,34	3,81
3. Konsumsi Pemerintah	3,85	4,23	0,11	3,05	1,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,39	3,34	1,46	1,03	12,31
a. Bangunan	4,50	1,55	1,61	0,42	12,77
b. Non-Bangunan	-1,07	7,33	1,77	0,98	5,40
PDRB	2,86	2,91	1,16	2,96	5,01

Ket : *) :Angka Sementara

**) :Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS berbagai sensus, survei, dan sumber lain

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://prabumulihkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PRABUMULIH**

Jendral Sudirman No. 60 KM 12 Komplek Pemkot Prabumulih

Telpon: (0713) 3920031

Email: bps1672@bps.go.id

Website: prabumulihkota.bps.go.id

ISSN 2723-8237



9 772723 823709